

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Muhammad, 2007. *"Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa"*. Pekanbaru:R & D Post Press.
- Chabib Soleh dan Heru Rohmansjah,2010. *"Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik"*.Bandung: Fokusmedia.
- Erlina dan Omar Sakti Rambe, 2015. *"Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual"*. Medan: Penerbit Salemba.
- Erlina dan Rasdianto, 2013. *"Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual"*. Medan: Brama Ardian.
- Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, 2014. *"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di kabupaten Jember"*.
- Donny Michael, 2017. *"Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perpespektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara"*.
- Hanif Nurcholis, 2011. *"Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa"*. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *"Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keungan Daerah Edisi 4"*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Hari Sabarno, 2007. *Memandu Otomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Cetakan I, Jakarta:Sinar Grafika.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*,LAN BPKP RI, Jakarta.
- Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa. 2017. *"Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang"*.
- Mardiasmo.(2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi pemerintahan"*.
- Mustazir Ramli. 2016. *"Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe"*.

- Nawawi, H.1998. *Metode Penelitian Deskriptif*.Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 593 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 592 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Puteri Ainnurohma Romantis. 2014.”*Akuntabilita Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panurukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*”.
- Sherly Gresita Apriliani. 2014.”*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*”.
- Sugiyono. 2016. ”*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&DE*Edisi 22.” Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Siti Khusniyatun. 2017. “*Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)*”.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. ”*Good Governance*”. Jakarta: UI Press.



**Sumber Elektronik**

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)